



Motif Diri dan Pengelolaan Kesan Jamaah Persatuan Islam Kota Bandung dalam Dakwah dan Politik

Hamzah Turmudi

¹UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

* email. hamzah.turmudi@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This study seeks to analyze self-motives and the management of the Islamic Unity congregation's impression in Bandung, both as preachers and politicians. The research was conducted with a qualitative approach through dramaturgical studies that tried to explore the religious understanding of the Islamic Union organization in the political field. The results showed that the self-motive to become a da'i and a politician for the Persis congregation was based on religious understanding from the Persis organization's perspective, which maps the constitutional field as a space for jihad. The motive for becoming a da'i and a politician is also based on the Persis tajdid organization's spirit since the organization's emergence. Meanwhile, the management of impression both as a preacher and politician refers to the view and assessment that politics is a way of da'wah, and da'wah is a political spirit.

Keywords: *self-motive Impression Management; Da'wah and Politics; Islamic Unity.*

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya menganalisis motif diri dan pengelolaan kesan jamaah Persatuan Islam di Kota Bandung baik sebagai da'i maupun politikus. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi dramaturgis yang berupaya menggali refleksi paham keagamaan organisasi Persatuan Islam dalam bidang politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif diri menjadi da'i dan politikus bagi jamaah Persis didasarkan pada paham keagamaan dalam sudut pandang organisasi Persis yang memetakan lapangan konstitusional sebagai ruang jihad. Motif diri menjadi da'i dan politikus juga didasarkan pada spirit tajdid organisasi Persis yang melekat sejak kemunculan organisasi ini. Sementara itu, pengelolaan kesan baik sebagai da'i maupun politikus merujuk pada pandangan dan penilaian bahwa politik adalah jalan dakwah, dan dakwah adalah spirit politik.

Kata Kunci: Motif Diri; Pengelolaan Kesan; Dakwah dan Politik; Persatuan Islam.

PENDAHULUAN

Berdirinya Organisasi Persatuan Islam memiliki latar belakang yang cukup panjang. Ia muncul karena tuntutan perkembangan kebangkitan dunia Islam. Kebangkitan Islam diartikan sebagai langkah menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Kebangkitan ini dicanangkan oleh Ibnu Taimiyah (1226-1328) dengan semboyannya Muhyi al-Tsarif Salaf, yakni membangkitkan kembali ajaran-ajaran lama. Konsep salaf mempunyai konotasi yang bermacam-macam. Istilah Muhyi al-Tsarif Salaf yang dikemukakan Ibnu Taimiyah mengandung arti membangkitkan kembali "ajaran-ajaran lama". Maksudnya ajaran para sahabat Rasul dan tabi'in; serta ajaran Ahmad Ibn Hanbal yang senantiasa mempraktikkan ijtihad dan sangat anti kemusyrikan. Pedoman satu-satunya yang dipakai adalah Al-Quran dan As-Sunnah (Wildan, 1997: 40). Langkah Salaf yang dipelopori Ibnu Taimiyah ini diteruskan oleh muridnya Ibnu Qayyim (1292-1350) meskipun ajaran ini tidak berkembang karena situasi yang belum memungkinkan dan umat Islam dalam keterbelakangannya. Empat abad kemudian Muhammad Bin Abdul Wahab (1703-1792) membangkitkan kembali ajaran ini dan menyebarkannya di Jazirah Arab. Akan tetapi, usaha ini masih mendapat rintangan dan belum dapat diterima.

Pada kurun waktu berikutnya, ajaran ini berkembang kembali. Titik perkembangan kali ini didorong oleh seorang pembaharu yang melakukan perjalanan panjang mulai Afganistan, India, Mesir, Syria, Parsi, Turki, dan Iran, yakni Jamaludin A1-Afghani (1839-1897). Kemudian, ajaran tersebut lebih dikembangkan kembali oleh muridnya yang menjadi Bapak pembaharu di mesir, yakni Muhammad Abduh (1845-1905) yang dilanjutkan oleh muridnya yang lain, yakni Rasyid Ridha (1856-1935). Pada dasarnya, ajaran ini berusaha menitikberatkan pemahaman ajaran-ajaran agama Islam yang murni serta mengharmonisasikannya dalam kehidupan keumatan dan politik.

Langkah pembaharuan Islam ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1892 bersamaan dengan pulanginya Haji Miskin dan kawan-kawannya dari Mekkah setelah mereka menunaikan ibadah haji. Mereka melihat langsung langkah pemurnian Islam di Jazirah Arab dan mencoba menyebarkannya di Minangkabau. Kelompok ini berupaya mengadakan perombakan kehidupan keumatan secara radikal dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah (Wildan, 1997: 5). Dalam perjuangannya, mereka mendapat tantangan keras dari umat maupun pemerintah kolonial Belanda saat itu sehingga menimbulkan Perang Paderi. Kelompok ini terkenal dengan julukan Harimau Man Salupan karena jumlahnya sembilan.

Semangat langkah pembaharuan ini mendapat perhatian yang besar dari umat Islam yang ada di perkotaan. Secara geografis dan kultural, umat kota lebih cepat berhadapan dengan pengaruh luar daripada umat desa. Mereka cenderung mengikuti alam pembaharuan yang sedang berkembang dan menempatkan diri sebagai kelompok "Modernis Islam". Ciri menonjol kelompok modernis adalah

adanya kepercayaan dan pemikiran bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Oleh karena itu, mereka memandang perlunya menerjemahkan ajaran Islam secara rasional. Hanya dengan cara itu, menurut mereka, ajaran Islam tidak hanya mampu bersaing dengan peradaban modern, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan umat sesuai dengan perkembangan zamannya.

Masyarakat Bandung nampaknya agak lambat menerima arus langkah pembaharuan dibandingkan kota yang lainnya di Indonesia (Wildan, 1997: 17). Kesadaran itu merupakan salah satu alasan berdirinya organisasi Persatuan Islam di Bandung pada tanggal 23 September 1923 oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan. Kelompok ini dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhamad Yunus. Sebagai organisasi formal yang berdiri secara resmi, Persatuan Islam telah merupakan wadah organisasi umat Islam. Nama "Persatuan Islam" mengisyaratkan maksud yang terkandung dalam pendirian organisasi tadi, dalam hal ini usaha untuk mewujudkan ruhul ijtihad dan jihad. Dengan perkataan lain, para pendiri Persatuan Islam berusaha mencapai harapan dan cita-cita dengan kehendak yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan usaha Islam, dan persatuan suara Islam. Bertitik tolak dari persatuan pemikiran, rasa, usaha, dan suara Islam, organisasi ini dinamakan Persatuan Islam.

Selain itu; nama tersebut diilhami pula oleh Firman Allah SWT. Surat Ali Imran ayat 103, "Dan berpegangteguhlah kamu sekalian kepada tali (undang-undang, aturan) Allah seluruhnya; dan janganlah kamu bercerai berai", serta sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Kekuatan Allah itu beserta jamaah". Firman Allah dan hadis Nabi tersebut dijadikan moto Persatuan Islam dan ditulis dalam lambang yang berbentuk lingkaran bintang bersudut dua belas (Wildan, 1997: 30).

Menurut Tafsir Qanun Asasi Persatuan Islam (1968 :8-9), pada mulanya Persatuan Islam yang terbentuk dan berdiri pada masa kolonial Belanda, tidak didasarkan atas kepentingan atau kebutuhan umat pada waktu itu. Para pendiriya tidak mempunyai kepentingan apa-apa di dalamnya. Mereka mendirikan Persatuan Islam karena terpanggil oleh kewajiban dan tugas risalah Allah. Para pendiri Persatuan Islam mendirikan Persatuan Islam bukan karena umat Islam Indonesia membutuhkannya untuk merombak tatanan kehidupan keislaman sebab mereka telah tenggelam dalam kebisuan, taklid, jumud, khurafat, bidah, tahayul, syirik, dan paham-paham lainnya. Oleh karena itu, Persatuan Islam berdiri tidak atas kebutuhan umat sebagaimana umat jahiliyah tidak membutuhkan Nabi, tetapi Persatuan Islam didirikan karena keberadaannya diperlukan. Ia berdiri atas dasar kewajiban akan tugas illahi untuk mengangkat umat dari kemandegan berpikir dan membuka ketertutupan pintu ijtihad.

Berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang berdiri pada awal abad 20, menurut Federspel (1970: 11), Persatuan Islam mempunyai ciri tersendiri yaitu

Motif Diri dan Pengelolaan Kesan Jamaah Persatuan Islam Kota Bandung dalam Dakwah dan Politik kegiatannya dititikberatkan pada pembentukan paham keagamaan. Isa Anshari (1958: 6) menyatakan bahwa Persatuan Islam tampil sebagai sebuah organisasi kaum muslimin yang sepaham dan sekeyakinan yang menyebarkan dan menyiarkan faham dan aliran Al-Quran dan As-Sunnah.

Sejak awal berdirinya (pada masa penjajahan Belanda), Persatuan Islam memiliki dua muka perjuangan. Pertama, perjuangan ke dalam, Persatuan Islam secara aktif membersihkan Islam dari faham-faham yang tidak berdasarkan Al Quran dan Hadis Nabi terutama yang menyangkut aqidah dan ibadah serta menyeru umat Islam supaya berjuang atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, perjuangan ke luar, Persatuan Islam secara aktif menentang dan melawan setiap aliran dan langkah anti Islam yang hendak merusak dan menghancurkan umat Islam di Indonesia. Karena itulah, segala aktivitas dan perjuangannya ditekankan pada usaha menyiarkan, menyebarkan, dan menegakkan faham Al-Quran dan As-Sunnah.

Persatuan Islam sebuah organisasi yang mengutamakan perjuangan dalam lapangan ideologi Islam, bukan memperbesar dan memperluas jumlah anggota dalam organisasi. Ia berjuang membentuk dirinya menjadi intisari kaum muslimin; ia mencari kualitas bukan kuantitas; ia mencari isi bukan jumlah. Ia tampil sebagai sumber kebangkitan dan kesadaran baru dan menjadi daya dinamika yang menggerakkan kebangunan umat Islam (Wildan, 1997: 9).

Organisasi Persatuan Islam di kota Bandung terdiri atas Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Jamaah. Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Bandung memiliki sekretariat di jalan Astanaanyar no. 310 Bandung. Ia berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas dan pelaksanaan jihad jamiyah cabang-cabang di daerah kerjanya dengan komposisi kepengurusannya. Struktur kepengurusan daerah dan cabang terdiri atas: Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Bidang Garapan Dakwah, SDM Organisasi Pendidikan, Sosial Ekonomi, Perwakafan, Perzakatan, Haji Dan Umrah.

Dalam Konteks Politik, Reformasi dalam banyak sisi diyakini telah memberikan arti penting dalam dinamika dakwah dan politik jamaah Persatuan Islam. Dinamika ini dianggap sebagai fenomena sosial, fakta sosial atau sebuah kenyataan sosial; dimana tidak dapat dipungkiri telah terjadi realitas status pada jamaah Persatuan Islam yang tidak hanya sebagai mubaligh dan *asatidz* namun juga menjadi politikus.

Selama ini stigma terhadap jamaah Persatuan Islam sebagai langkah puritan fiqhiyah seperti anti TBC (takhayul, bid'ah dan churafat). Stigma yang melekat pada Jamaah Persatuan Islam tersebut merupakan pandangan bersifat etik, yaitu sebuah pemikiran yang melihat jamaah Persatuan Islam dari sudut pandang orang luar, bukan bagaimana jamaah Persatuan Islam melihat dirinya sendiri sebagai sosok yang sesungguhnya. Sedangkan pandangan emik merupakan pendapat yang

keluar dari diri jamaah Persatuan Islam dimana ia mengalami atau terlibat langsung yaitu sebagai da'i dan juga sebagai politikus.

Jamaah Persatuan Islam sebagai aktor kehidupan yang bersifat interpretif, dimana peran jamaah dilihat sebagai subjek yang mungkin masyarakat tidak mengetahui kehidupan sesungguhnya dari dunia kehidupan sebagai da'i dan juga politikus. Pandangan subjektif seperti ini diperlukan untuk mengimbangi pandangan begitu dominan di masyarakat, yaitu pandangan objektif, memandang jamaah Persatuan Islam sebagai anti tradisi "nenek moyang" dan cenderung eksklusif.

Jamaah Persatuan Islam di kenal sebagai kelompok Puritan terutama pada tataran *fiqhiyah*; sehingga cenderung eksklusif. Namun pada saat berada dalam langkah arus politik, mereka akan berinteraksi dengan banyak kalangan yang mengharuskan mereka lebih bersikap terbuka dan kooperatif. Maka pada dimensi inilah akan terjadi proses perubahan status jamaah Persatuan Islam.

Motif dan konsep diri jamaah Persatuan Islam merupakan subjek sekaligus objek dari refleksi yang sadar tentang dirinya di lingkungan internal diri sendiri yang mengetahuinya. Motif merupakan pengertian yang melingkupi alasan-alasan atau dorongan dalam diri jamaah Persatuan Islam yang menyebabkan mereka berbuat sesuatu.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konsep dramaturgis dalam dakwah Islam dilakukan oleh Fatoni & Rais (2018) yang meneliti dramaturgis dakwah komunitas Pemuda Hijrah di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemuda Hijrah melakukan pengelolaan kesan da'i dengan efektif menggunakan media sosial sebagai panggung depan pengelolaan kesan. Penelitian yang sama dilakukan oleh Sulaeman, Sulastri & Nurdin (2018) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan kesan dakwah di Kota Ambon dilakukan dengan menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal melalui pengelolaan kesan situasional, terencana, dan spontan. Sebelumnya, Farhan (2014) mendeskripsikan tentang bahasa dakwah struktural-kultural da'I dalam perspektif dramaturgi. Melalui kajian tokoh da'i –Habib Hadi Zainal Abidin al Habsyi- di kota Probolinggo Jawa Timur. Disimpulkan bahwa bahasa dakwah Habib Hadi bin Muhammad al Habsyi dibidang organisasi politik dan organisasi masyarakat disampaikan secara verbal dan nonverbal.

Penelitian tentang konsep dramaturgis dakwah Islam yang dilakukan baik secara individual maupun institusional menjadi kerangka akademik dalam menggali konsep dramaturgis dakwah Islam yang dilakukan oleh organisasi Persatuan Islam. Koswara & Gemiharto (2017) melakukan riset tentang dramaturgis komunikasi politik Persatuan Islam. disimpulkan bahwa melalui manuper komunikasi politik yang dilakukannya jamaah persatuan islam telah menunjukkan eksistensinya sebagai politisi yang handal dalam kancah politik. Selanjutnya, penelitian Amin (2018) yang menganalisis eksistensi dakwah Persatuan Islam

Motif Diri dan Pengelolaan Kesan Jamaah Persatuan Islam Kota Bandung dalam Dakwah dan Politik dalam bidang politik melalui kajian tokoh. Dimana Amin mengkaji tentang sosok KH. Latief Muchtar (Mantan Ketua Umum PP Persis) dalam konteks pemikiran dan perubahan politik organisasi Persatuan Islam pada periode 1983-1999. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan ijtihad politik Persatuan Islam pada masa kepemimpinan Latief Muchtar tidak merubah identitas organisasi secara menyeluruh. Perubahan politik dianggap sebagai sebuah implikasi dari dinamika sosial-politik yang terjadi di Indonesia.

Dalam konteks politik, penelitian Abdurrahman (2005) cukup menarik yang mengkaji tentang fenomena golput dalam tubuh organisasi Persatuan Islam dalam pemilu tahun 2004. Penelitian ini merujuk pada fatwa golput yang dikeluarkan oleh ulama Persatuan Islam pada Pemilu 2004. Dimana ada tiga polarisasi fatwa, yakni mewajibkan, mengharamkan dan membolehkan dengan alasan-alasan syar'i. penelitian lainnya terkait Persatuan Islam seperti dilakukan oleh Irawan (2018) yang menganalisis komunikasi organisasi Persatuan Islam dalam sudut pandang studi etnografi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi Persatuan Islam mengacu pada pattern umum, kecuali dalam skema kognitif menunjukkan dominasi pemahaman keagamaan. Dalam penggunaan varietas bahasa jamaah Persatuan Islam banyak dipengaruhi budaya pesantren. Selanjutnya dalam kompetensi interaksi, jamaah persatuan Islam menunjukkan kohesifitas kolektif.

Penelitian lainnya yang dapat dijadikan sebagai kerangka rujukan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneropong kondisi objektif organisasi Persatuan Islam di beberapa daerah. Misalnya, Risdiana (2019) yang menganalisis tentang strategi dakwah Persatuan Islam di Riau. Dimana disimpulkan bahwa organisasi Persatuan Islam di Riau melalui perencanaan dakwah sesuai dengan dinamika lokal dan kondisi objektif wilayah untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sebagaimana visi organisasi. Sebelumnya, Fatimah (2018) melakukan kajian tentang dakwah Persatuan Islam di Kepulauan Sumenep Kabupaten Madura.

Penelitian-penelitian di atas dapat dijadikan sebagai rujukan dalam meneropong pola komunikasi, dakwah dan politik organisasi Persatuan Islam. dimana hal ini berkaitan dengan fungsi dan peran serta organisasi Persatuan Islam yang menjadikan organisasi atau jamiyyah sebagai ruang aktualisasi dakwah Islam dalam berbagai *leading sector* kehidupan manusia, termasuk didalamnya berkaitan dengan bidang politik. Penelitian ini ingin memotret dan mencermati bagaimana motif diri jamaah Persatuan Islam di Kota Bandung dalam konteks dakwah dan politik. Masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini terkait dengan fenomena motif menjadi da'i dan motif menjadi politikus.

Untuk menjelaskan fenomena di atas digunakan perspektif interaksi simbolik dalam konteks politik. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa "pembicaraan politik adalah aktivitas simbolik" (Nimmo, 2000: 66). Penelitian ini berusaha memahami motif diri jamaah Persatuan Islam secara spesifik yang

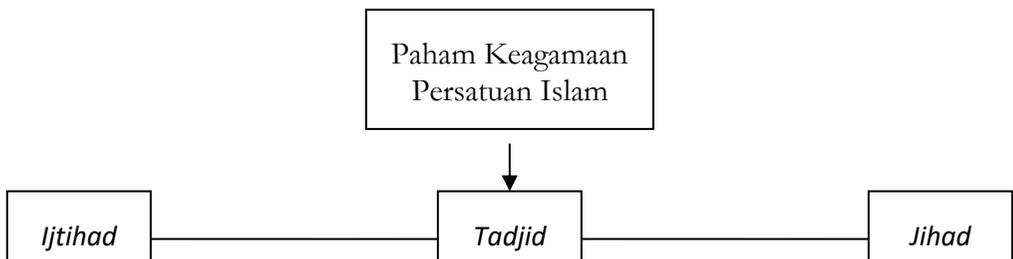
alamiah. Perilaku yang teramati dipahami berdasarkan perspektif orang yang diteliti, termasuk cara mereka menggunakan simbol dalam konteks yang spesifik. Peneliti berempati, dan sedapat mungkin mengalami apa yang disebut Weber (1968, dalam Bogdan & Taylor, 1993: 45) sebagai "verstehen", yakni "menyerap dan mengungkapkan lagi perasaan-perasaan, motif-motif, dan pemikiran-pemikiran yang ada di balik tindakan orang yang diteliti.

Menjadi politikus akan memberikan implikasi dalam kehidupan jamaah Persatuan Islam. Setelah jamaah Persatuan Islam menjadi politikus tentu terjadi pandangan yang berubah dari masyarakat terhadap dirinya dan ini akan memberikan implikasi pada pribadi jamaah Persatuan Islam itu sendiri; di satu sisi memiliki status sebagai jamaah Persatuan Islam (da'i) di sisi lain sebagai politikus, tentunya hal tersebut akan membuat perubahan konsep diri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Paham Kegamaan Ke Paham Politik

Jamaah Persatuan Islam memiliki paham keagamaan yang khas. Dari paham keagamaan inilah paham politik Persatuan Islam menemukan pijakannya secara kuat dan transendental. Terma-terma paham keagamaan jamaah Persatuan Islam yang menonjol dan memberikan warna dalam paham politik jamaah Persatuan Islam diantaranya adalah: Ijtihad, tajdid, dan jihad



Gambar 1

Refleksi paham keagamaan Persatuan Islam

Sumber: Data Olahan Penulis

Pertama, Ijtihad. Secara literal, ijtihad didefinisikan sebagai "berusaha sekuat tenaga", "mengerahkan tenaga", atau "memaksimalkan diri". Dalam pengertian fiqh Islam, salah satu definisi umumnya adalah "usaha maksimal yang dilakukan oleh ahli fiqh untuk menguasai dan menerapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang bertujuan untuk menyingkap hukum Allah (B Wael, 1984:19) Akan tetapi terdapat versi lain tentang definisi ijtihad, misalnya kemampuan untuk melakukmn deduksi dalam masalah hukum terhadap kasus-kasus di mana tidak

Motif Diri dan Pengelolaan Kesan Jamaah Persatuan Islam Kota Bandung dalam Dakwah dan Politik terdapat teks tertulis atau aturan yang sudah ditetapkan oleh ijma (konsensus) yang, bisa diterapkan (Abdul Rahim.1981:58).

Perbedaan definisi tersebut telah memainkan peran penting terhadap ahli hukum Islam dan kelompok muslim. Definisi pertama menunjukkan bahwa ijtihad merupakan sebuah proses penelusuran akademik secara terus menerus tidak ada batasan sama sekali dari segala aspek dan waktunya. Sebaliknya definisi kedua menunjukkan bahwa ijtihad terbatas dari segi aspek, cakupan dan waktu. Ijtihad bisa dijalankan secara individu atau kolektif dan bagi mereka yang tidak mampu melakukannya harus ber-ittiba' yakni menerima atau mengikuti fatwa seseorang dengan syarat mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari fatwa tersebut (Ahmad Jaenuri.2002:105)

Informan UR memaparkan:

“Istilah serta penerapan ijtihad yang kemudian di putuskan oleh dewan Hisbah Persatuan Islam tidak hanya untuk persoalan-persoalan yang berkait erat dengan fiqh, terutama masailul fiqh, seperti hal-hal yang menyangkut furuiyah. Sekarang ijtihad juga di gunakan pada persoalan-persoalan politik. Tentunya tidak pada semua aspek politik. Ana menggunakan kata ini pada: bagaimana politik yang di posisikan sebagai media dakwah bisa menghantarkan tujuan-tujuan dakwah. Maka sangat dibutuhkan ijtihad. Manakala gerakan dakwah masuk pada wilayah politik, kemudian terjadi pengumpulan antara gerakan dakwah disertai dengan politik, maka jadilah idaratul itihad antara dakwah dengan politik. Kami jamaah Persatuan Islam menyebut itu semua dengan istilah ijtihad siyasi”

Menjalankan ijtihad di Persatuan Islam, didirikanlah Dewan Hisbah yang dimandatkan untuk "memformulasikan" dasar-dasar aqidah Persatuan Islam. Setiap ide atau teori yang sudah disepakati oleh Dewan Hisbah ini bisa diterapkan sebagai justifikasi logis atau filosofis bagi program-program dan tujuan-tujuan dari gerakan dakwah. Tujuan awal dari Dewan Hisbah adalah untuk mengakhiri hegemoni madzhab atas ummat muslim. Pada perkembangan selanjutnya, kata ijtihad telah digunakan di Forum-forum di luar masalah agama, yakni dalam masalah politik. Selama era reformasi, jamaah Persatuan Islam sering kali memakai istilah ini untuk menjustifikasi sikap politik. Oleh karena itu lahirlah istilah Ijtihad siyasi.

Kedua, Tajdid. Jamaah Persatuan Islam memaknai tajdid adalah: Pemurnian yang meliputi pemahaman, internalisasi, dan penerapan hal-hal yang sudah tetap dalam Islam, seperti otoritas Al-Qur'an, Al-hadits, ibadah, etika Islam, dan hubungan sosial, dan modernisasi dalam hal-hal yang tunduk pada perubahan kondisi, seperti sistem organisasi, pengembangan model-model pendidikan dan sebagainya. Dengan sepirit tajdid inilah jamaah Persatuan Islam dikenal sebagai langkah purifikasi atas praktek keagamaan yang menyimpang dalam bentuk takhayul, bid'ah, dan khurofat (TBC).

Informan EL memaparkan:

“Gerak langkah yang dilakukan saya di upayakan tidak menyimpang dari qur’an dan hadis. Apalagi harus masuk ke dalam kenistaan bid’ah. Kita kan tau bahwa bid’ah itu sesat. Kullu bid’atin dlolalah wakullu dlolalalatin finnar. Jadi tidak ada bid’ah hasanah sebab di situ kul liljam’i. semua itu harus berani kita nyatakan baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan sehari-hari, bahwa untuk mengamalkan islam itu harus kemabli dan berdasar pada ajaran yang bersumber dari qur’an sunah bukan dari budaya nenek moyang. saya konsisten melakukan dakwah sesuai yang saya yakini kebenarannya. Namun demikian saya lakukan semanis mungkin agar tidak menimbulkan keresahan terutama di antara sesama pemain politik”

Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian takhayul, dan churofat mengalami reinterpretasi yang lebih luas, tidak hanya menyangkut praktik keagamaan, tetapi juga praktik sosial dan politik, termasuk dalam praktik kehidupan umat. Begitu pun juga, dengan makna tajdid sebagai modernisasi menjadikan jamaah Persatuan Islam dikenal sebagai pembaharu mampu melahirkan perubahan-perubahan.

Ketiga, Jihad. Terminologi jihad secara literal berarti "berusaha keras" atau "berjuang". Di jamaah Persatuan Islam telah diakui apa yang pernah dikemukakan oleh para ahli hukum Islam bahwa dakwah sebagai sebuah kewajiban dalam merubah kemunkaran menjadi kebaikan dapat dilaksanakan dalam empat cara: (i) dengan hati, (ii) dengan lisan. (iii) dengan pikiran. (iv) dengan kekuasaan. Menurut jamaah Persatuan Islam kata dakwah sering digandengkan dengan kata sabili rabbi (di jalan Allah) dan juga dengan hikmah (kebijakan) (Zakaria, 1997:12).

Menurut pemaparan informan TR:

“Menurut ana politik juga memiliki makna kekuasaan yang diperoleh melalui kekuatan¹-kekuatan politik praktis yaitu partai politik. Kekuasaan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan dakwah yang menjadi agenda utama kita. “Yadullahi fauqo aidihim” atau “Man ra-a minkum mun karan falyughayir biyadihi”. Kita mengenal apa yang pernah dikemukakan oleh para ahli hukum Islam bahwa dakwah sebagai sebuah kewajiban dapat dilaksanakan dengan hati, dengan lisan, dengan pikiran, dengan kekuasaan. Kata dakwah sering digandengkan dengan kata sabili rabbi dan juga dengan hikmah. Ud’u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini berarti bahwa dakwah tidak boleh menyimpang dari jalan Allah yaitu qu’an sunah, juga dakwah mesti di kemas dengan sebijak mungkin. Ana berpendapat kemas itu harus kuat; sementara untuk saat ini kekuatan kemas dakwah berada pada ranah kekuasaan politik. Semua yang dilakukan dalam proses tersebut di atas

Motif Diri dan Pengelolaan Kesan Jamaah Persatuan Islam Kota Bandung dalam Dakwah dan Politik merupakan jihad”

Dengan pemaknaan jihad dalam arti yang luas sebagaimana dikemukakan oleh jamaah Persatuan Islam tersebut di atas, hal tersebut menjadi landasan bagi lahirnya langkah sosial jamaah Persatuan Islam. Semangat jihad ini pula lah yang menjadi kekuatan jamaah Persatuan Islam membangun dan mengembangkan dakwah melalui persoalan-persoalan politik kekuasaan.

Pada konteks ini pandangan dunia keagamaan jamaah Persatuan Islam sebagaimana disebutkan di atas dapat ditegaskan bahwa tajdid merupakan fondasi “*worldview*” jamaah Persatuan Islam; sementara ijtihad adalah “*intellectual exercis-nya*” tajdid dalam lapangan sosial kehidupan agama; sementara jihad dan dakwah merupakan dimensi sosiologisnya. Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya adalah kegiatan politik. Politik dalam doktrin jihad Persatuan Islam adalah “dakwah”. Aktivitas politik melalui partai dilakukan jamaah Persatuan Islam itu dimaknai sebagai strategi dakwah.

Dalam hal ini ijtihad sebagai sebuah ruang dalam memaknai dan menetapkan dasar hukum terkait fenomena-fenomena yang berkembang dan bersifat dinamis. Perumusan ijtihad didasarkan pada kerangka dan asas yang diambil dari al-qur’an dan hadits. Bagi Persatuan Islam terdapat metode *istinbath* hukum yang ditinjau dari berbagai sudut pandang (Abbas, 2016). Dalam konteks praktis, ijtihad juga dilakukan dalam kerangka politik dalam setiap kontestasi yang berlangsung di Indonesia. Gagasan politik Persis tidak terlepas dari gerakan tajdid yang menjadi spirit organisasi. Pada faktanya, gerakan tajdid ini berorientasi pada gerakan dakwah yang dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan (Risidiana, 2019). Didalamnya, proses ijtihad dijadikan sebagai kerangka yang memagari berbagai respon organisasi terkait berbagai dinamika yang terjadi.

Motif menjadi da’i

Berdasarkan hasil penelitian, para informan tidak langsung begitu saja mengambil keputusan menjadi da’i. Terdapat proses yang bersifat sosio historis seiring perjalanan kehidupan yang dilaluinya. Hasil wawancara dan pengamatan peneliti ditemukan bahwa motif yang memicu jamaah Persatuan Islam untuk memiliki daya atau tenaga menjadi da’i teridentifikasi berdasarkan penelitian ini adalah panggilan jiwa, kembali ke fithrah, ukhuwah islamiyah, dan ingin merasakan pengalaman sebagai seorang da’i.

Table 1

Motif Informan Menjadi Da’i

Motif Menjadi Da’i	Jumlah Informan
Fithrah	2
Ukhuwah Islamiyah	2
Merasakan Pengalaman	2

Panggilan Jiwa	6
Total	12

Sumber Data: Hasil wawancara dan pengamatan penulis

Berdasarkan tabel 1 di atas ditemukan bahwa terdapat informan yang memiliki beberapa motif menjadi da'i, tetapi terdapat juga yang hanya memiliki dua motif saja, semua aspek tersebut saling mengisi dan saling melengkapi.

Motif pertama adalah panggilan jiwa. Beberapa informan menceritakan bahwa diantara mereka ada yang merasakan kegersangan hati, kehampaan jiwa. Sebagai seseroang yang pernah tinggal dan di didik di pondok pesantren sekalipun sudah rajin solat lail, puasa Senin-Kamis, puasa daud. Namun semua terasa hampa manakala ilmu yang di dapat belum diamalkan secara utuh termasuk belum disebarluaskan dan akhirnya tidak nyaman.

Motif yang kedua adalah kembali ke fithrah. Manusia adalah makhluk yang ingin mengetahui fithrah-nya. Cara untuk kembali ke fithrah setiap orang berbeda-beda ada yang mudah namun juga ada yang sulit. Menurut pengakuan sejumlah informan tergambar bahwa diantara motif jamaah Persatuan Islam menjadi da'i karena ingin kembali ke fithrah sebagai hamba Allah.

Motif ketiga adalah ukhuwah islamiyah. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, membutuhkan teman untuk bercerita, berbagi pengalaman dan tempat mencurahkan isi hati. Dengan memiliki teman akhirnya dapat mempengaruhi pada cara menyikapi sesuatu, berfikir dan bertindak seseorang. Pada awlanya boleh jadi seorang jamaah Persatuan Islam tidak tertarik untuk menjadi da'i bahkan sulit untuk berbicara di podium; namun karena berteman dengan orang yang rajin melakukan gerakan dakwah bahkan karena masa lalau jamaah Persatuan Islam adalah satri, maka dia terbawa untuk berdakwah dan akhirnya menikmati kegiatan tersebut. Inilah yang dirasakan beberapa informan yang mengemukakan pengalamannya pada peneliti. Kebanyakan informan yang diwawancarai mengaku bahwa pertemanan telah mendorong mereka masuk atau aktif berdakwah.

Motif keempat adalah karena ingin merasakan sebagai seorang da'i. Beberapa informan mengisahkan bahwa yang mendorong mereka memilih menjadi da'i sebagaimana yang dikemukakan oleh JN, adalah ingin merasakan bagaimana perjuangan seorang penyiar ajaran suci. M: menceritakan, sebelum menjadi da'i dia telah aktif sebagai mustami di pengajian-pengajian Persatuan Islam. Seiring dengan pergaulannya, M mulai mengenal aktivitas sebagai seorang da'i melalui pengajian-pengajian yang ia ikuti dan beberapa referensi yang ia baca tentang perjuangan seroang penyiar ajaran agama Islam. Sesudah banyak menyaksikan, menghadiri serta mempelajari dengan seksama akhirnya M mencoba untuk memberanikan diri berceramah berbekal ilmu yang ia peroleh dan pengalamannya sebagai alumnus dari pondok pesantren Persatuan Islam.

Motif panggilan jiwa, motif ingin kembali ke *fitrah*, motif karena *ukhawah islamiyah*, serta motif ingin mengalami langsung sebagai da'i. Semuanya setelah di telaah ternyata tidak saling menafikan tetapi saling melengkapi satu sama lainnya. Dengan demikian, terdapat informan yang memiliki semua aspek tersebut di atas secara keseluruhan, namun terdapat juga yang hanya dengan salah satu motif saja. Informan MF misalnya yang memiliki keseluruhan motif yakni motif panggilan jiwa, motif ingin kembali ke *fitrah*, motif karena *ukhawah islamiyah*, serta motif ingin mengalami langsung sebagai da'i; sehingga ia memilih menjadi seorang da'i.

Motif da'i jamaah Persatuan Islam beriringan dengan dinamika perubahan kondisi sosial-politik kepemimpinan. Figuritas kepemimpinan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam memandang dakwah dan mempengaruhi pengalaman menjadi seorang da'i. misalnya, kepemimpinan Latief Muchtar pada dekade 1990-an memberikan warna baru terhadap dinamika peta dakwah di Indonesia. Persis tidak lagi berdakwah dengan gebrakan-gebrakan shock Therapy tetapi melalui pendekatan persuasif edukatif (Amin, 2018). Persis melakukan ekspansi dakwah Islam tidak hanya pada ruang-ruang kultural, tetapi juga pada ruang-ruang intelektual. Hal ini dapat dilihat bagaimana segmentasi dakwah Persis mulai merambah dunia kampus dan mendirikan organisasi otonom seperti Himpunan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswi Persatuan Islam. Pada titik inilah, dinamika gerakan dakwah Persis memberikan pengaruh signifikan kepada jamaah Persis dalam memaknai dakwah dan mempengaruhi motif diri menjadi seorang da'i.

Motif Menjadi Politikus

Berdasarkan hasil penelitian, hasil wawancara dan pengamatan para informan tidak langsung begitu saja mengambil keputusan menjadi politikus. Terdapat proses yang bersifat sosio historis seiring perjalanan kehidupan yang dilaluinya. Motif yang memicu mereka untuk menjadi politikus teridentifikasi berdasarkan penelitian ini adalah: Islam itu agama yang harus membawa tadjid, Islam adalah agama dakwah sehingga dakwah dan politik tidak bisa dipisahkan, Islam adalah agama jihad maka melalui jalur politik bisa menjadi sarana untuk berjihad, untuk mendorong semua itu adalah dengan meraih kekuasaan.

Tabel 2.

Motif menjadi politikus

Motif Menjadi Politikus	Jumlah
Islam itu agama yang harus membawa tadjid	6
Islam adalah agama dakwah sehingga dakwah dan politik tidak bisa dipisahkan	3
Islam adalah agama jihad maka melalui jalur politik bisa menjadi sarana untuk berjihad	1

Sumber Data: Hasil wawancara dan pengamatan

Tabel 2 di atas menyatakan bahwa adanya keyakinan bahwa langkah politik bisa menjadi sarana untuk melakukan gerakan tadjid. Hal itu di yakini karena Islam itu agama yang harus melahirkan perubahan. Adanya keyakinan bahwa dakwah dan politik itu tidak bisa dipisahkan, maka langkah politik sebagai sarana untuk berjihad.

Kesadaran bahwa Islam itu agama yang harus melahirkan perubahan. Belum dinilai sempurna iman seseorang apabila berislam hanya untuk dirinya sendiri. Islam itu harus melahirkan perubahan dan perubahan itu akan signifikan kalau menggunakan kekuasaan. inilah yang mendorong UR masuk dalam langkah politik. Keyakinan bahwa berpolitik merupakan langkah yang memberikan manfaat terhadap perkembangan dakwah merupakan hal yang melekat pada diri jamaah Perstuan Islam.

Kesadaran diri serta keyakinan bahwa dakwah dan politik itu tidak bisa dipisahkan bagaikan dua sisi dari satu mata uang, saling mengisi dan saling menyempurnakan. Semua itu merupakan langkah dakwah, konsekwensinya semua langkah da'i secara tidak langsung juga merupakan langkah yang menjadi langkah politik.

Langkah politik bisa menjadi sarana untuk berjihad. Jihad bukan hanya berperang dengan kafir, akan tetapi jihad adalah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Berkiprah dalam dunia politik untuk memperbaiki kondisi umat kearah yang lebih baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam merupakan jihad, inilah yang menjadi motif IL masuk dalam langkah politik.

"Dengan masuk dalam dunia politik, saya bisa menambah jaringan silaturahmi dengan teman, kolega, serta kenalan lainnya. Semua itu menjadi sarana saya untuk berjihad. Sebab dengan menjabat sebagai anggota dewan seiring bertambah kuatnya relasi, maka saya bisa leluasa melakukan perjuangan dakwah, dengan kata lain saya bisa berjihad dengan lebih kuat lagi melawan kemunkaran. Negoisasi, konsolidasi dan pencitraan selalu memberi peluang bagi saya untuk terus berjihad dalam rangka berdakwah"

Langkah politik sebagai sarana untuk meraih kekuasaan dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ajaran Islam tidak akan bisa diterapkan secara sempurna apabila tidak memiliki kekuasaan dan kekuasaan bisa diperoleh dengan cara berpolitik atau terlibat dalam kegiatan politik. Inilah yang menjadi motif TR masuk dalam langkah politik. Dia menjadi fungsionaris partai Keadilan Sejahtera.

Hal tersebut di atas merupakan motif yang menjadi pendorong para da'i jamaah Persatuan Islam masuk dalam langkah politik, yaitu keyakinan bahwa Islam itu agama yang harus melahirkan perubahan. Keyakinan integritas anatar

Motif Diri dan Pengelolaan Kesan Jamaah Persatuan Islam Kota Bandung dalam Dakwah dan Politik dakwah dan politik sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Keyakinan bahwa langkah politik bisa menjadi sarana untuk berjihad di jalan Allah melalui amar ma'ruf dan nahi munkar. Hasil wawancara dengan UR dan TR: Kesadaran akan keyakinan bahwa langkah politik sebagai sarana untuk melakukan perjuangan atau jihad. Aspek-aspek tersebut di atas sifatnya bukan saling meniadakan tetapi saling melengkapi. Artinya ada informan yang hanya memiliki satu aspek motif saja namun ada juga informan yang terdorong oleh beberapa aspek sekaligus.

Pengelolaan Kesan Jamaah Persis sebagai Da'i dan Politikus

Pengelolaan kesan (*impression management*) dari Goffman (Mulyana, 2001:112) mengatakan bahwa pengelolaan kesan merupakan teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu yang menjadi konsentrasi kajian dramaturgis Goffman adalah penggunaan panggung oleh sang aktor dalam kehidupan sosialnya, yang oleh Goffman (1959: 109) dibagi menjadi dua wilayah yakni wilayah depan (*front region*) dan wilayah belakang (*back region*).

Sebagai aktor sosial, senantiasa berkomunikasi dengan menggunakan dua wilayah tersebut (*front region* dan *back region*). Pengelolaan kesan dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai salah satu fenomena komunikasi yang dikonstruksi jamaah Persatuan Islam sebagai politikus, dalam upaya mereka memberikan kesan-kesan tertentu kepada mitra komunikasinya.

Seseorang yang menjadi politikus dalam penelitian ini adalah jamaah Persatuan Islam yang sedang menjalani dua status, yakni sebagai da'i dan sebagai politikus. Hal ini terjadi sejak orde Reformasi dengan aktif di partai politik atau terpilihnya sebagai anggota legislatif. Peristiwa tersebut sekaligus menandai dimulainya lembaran hidup baru bagi jamaah Persatuan Islam hidup di dua keadaan yakni sebagai da'i dan sebagai politikus. Sebagai politikus di sebabkan karena mereka masuk ke ranah politik praktis. Kondisi seperti inilah menuntut jamaah Persatuan Islam memiliki dua sikap yakni sikap sebagai da'i dan sikap sebagai politikus.

Status sebagai da'i merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari jamaah Persatuan Islam. Dalam konteks penelitian, hal tersebut sebagai status objektif. menurut Berger dan Luckmann (1990:235), hal ini terjadi sebagai legitimasi struktur kemasyarakatan dan telah menjadi pengetahuan umum mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, status jamaah Persatuan Islam sebagai da'i dalam konteks penelitian ini dapat juga disebut dengan diri objektif.

Dalam pengamatan peneliti jamaah Persatuan Islam menampilkan diri objektifnya ketika berada dalam komunitasnya, atau di depan ikhwan yang telah mengerti siapa dirinya. Mereka berkomunikasi tanpa beban apa adanya dengan cara yang bisa mereka lakukan.

Menurut pemaparan TR dan TQ:

"Ketika kami bertemu sesama ikhwan, kami berdiskusi dengan santai,

terjadi saling tukar pengalaman terutama mengenai permasalahan umat”

"Kami akan terbuka satu sama lain dalam kegiatan pengajian”

Pernyataan TR dan RQ di atas menggambarkan bagaimana diri mereka ditampilkan seperti apa adanya di depan komunitasnya. Mereka tidak memiliki beban psikis apapun ketika berinteraksi di dalam komunitasnya yakni dihadapan sesama jamaahnya.

Sebagai da'i merupakan status objektif yang dipahami oleh jamaah Perstuan Islam juga jamaah yang lain atau ikhwan. Sementara statusnya sebagai politikus, yang identik dengan identitas subjektif versinya Berger dan Luckmann (1990:235) merupakan identitas yang dihadirkan atau dikonstruksi oleh jamaah Persatuan Islam dalam situasi dan dengan motif tertentu. Status subjektif hadir dilatarbelakangi oleh keinginan para informan menampilkan sosok politikus yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan kritis terhadap penguasa. Oleh karena itu munculnya status subjektif ditandai oleh adanya upaya jamaah Persatuan Islam untuk mengkonstruksi realitas- \neg realitas tertentu yang antara lain dengan cara mengelola kesan agar orang lain yang melihatnya dalam hal ini mitra komunikasinya yakin bahwa mereka politikus yang bersih, jujur, serta amanah.

Peneliti menemukan baik lewat pengamatan maupun lewat pengakuan para informan bahwa jamaah Persatuan Islam mencitrakan dirinya atau menampilkan status subjektifnya melalui pengelolaan kesan (*impression management*). Pengelolaan kesan jamaah Persatuan Islam dapat dilihat ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain pada konteks atau situasi sosial tertentu, atau yang oleh Goffman (1959:109-110) disebut dengan *front region*, yang berbeda dengan fenomena komunikasi yang ditampilkan mereka ketika berada di panggung belakang (*back region*), Goffman (Mulyana, 2001:114-115) mambagi panggung depan (*front region*) ke dalam dua bagian yakni; *setting* dan *front pribadi*. *Setting* merupakan situasi fisik yang harus ada ketika aktor harus malakukan pertunjukan. Sedangkan *front pribadi* terdiri dari alat-alat yang dapat dianggap khalayak sebagai perlengkapan yang dibawa aktor ke dalam *setting* Bahasa verbal dan bahasa tubuh sang aktor juga dapat dikategorikan sebagai *personal front*.

Personal front, *personal* yang ditampilkan jamaah Persatuan Islam secara verbal adalah mereka menghindari penggunaan kata-kata yang bernuansa bahasa Arab; mereka menggunakan bahasa yang familiar dengan bahasa yang sedang diajak bicara padahal sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa komunikasi ikhwan dengan sesama dalam pengamatan peneliti memiliki nuansa yang khas apabila dibandingkan dengan komunikasi dengan bukan ikhwan. Kekhasan tersebut antara lain dalam bahasa verbal dan non verbal yang mereka tampilkan. Komunikasi verbal sesama ikhwan ditandai dengan panggilan-panggilan dengan menggunakan bahasa Arab. Misalnya, menggunakan kata *ana*, *antum*, dan lain sebagainya.

Inilah bahasa khas para jamaah Persatuan Islam. Mereka sangat akrab dengan kata-kata bahasa Arab, mengucapkannya tanpa beban. Penampilan yang apa adanya tanpa beban ini bukan hanya dalam bahasa verbal tetapi juga dalam bahasa non verbal; mereka sering mengenakan baju koko tanpa mengenakan peci. Inilah setting panggung belakang (back region) bagi para jamaah Persatuan Islam mereka bisa menampilkan diri ideal yang apa adanya tanpa ada unsur rekayasa dan pengelolaan kesan.

Penampilan seperti apa adanya ini segera berubah saat jamaah Persatuan Islam berada di hadapan orang lain di luar komunitasnya atau di luar ikhwan, baik dalam setting wilayah gedung parlemen maupun setting lokasi lain di luar parlemen. Kata-kata yang diadopsi dari bahasa Arab seperti kata Ana, Antum, dan lain sebagainya tidak dipergunakan dalam komunikasi mereka termasuk bahasa non verbalnya. Jamaah lebih suka menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia ketika mereka berkomunikasi dengan bukan ikhwan.

Peneliti juga melihat jamaah Persatuan Islam sering mengenakan kemeja lengan panjang dengan berdasari atau baju batik dalam menghadiri acara-acara informal dengan anggota parlemen yang bukan jamaah Persatuan Islam, padahal mayoritas jamaah Persatuan Islam suka memakai baju koko dalam kegiatan-kegiatan internalnya. Ini gambaran bahwa front region jamaah Persatuan Islam saat berkomunikasi dengan bukan ikhwan. Jamaah Persatuan Islam menentukan setting pengelolaan kesan mereka.

Ketika peneliti menanyakan kepada beberapa informan, apakah hal tersebut dilakukan dengan sengaja agar menarik simpati masyarakat atau sesama politisi di parlemen sehingga menumbuhkan pencitraan positif. Apakah tidak akan mengurangi nilai-nilai yang di usung jamaah Persatuan Islam untuk selalu jujur dalam segala hal. Bukankah itu semua merupakan tindakan hypocrite. Menanggapi atas pertanyaan tersebut jamaah Persatuan Islam mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan semata untuk kepentingan dakwah; dalam ajaran agama di kenal dengan siyasah.

Sebagai aktor sosial, jamaah persatuan islam tentu selalu berkomunikasi dengan khalayaknya, dan bersikap berdasarkan pemaknaannya terhadap penilaian orang lain terhadap dirinya. Status politikus yang disandang jamaah persatuan islam, tentu akan menimbulkan pandangan dan penilaian terhadap dirinya (Koswara & Gemiharto, 2017). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara ditemukan bahwa jamaah Persatuan Islam dalam langkah politiknya tidak tekstual dogmatis, akan tetapi setelah mereka masuk di ranah politik menjadi lebih lentur dan membaur dengan lingkungannya. Hal tersebut menepis anggapan bahwa Peresatuan Islam cenderung eksklusif dan tekstual dalam berpandangan.

Kesadaran sebagai da'i membawa jamaah persatuan islam untuk melakukan perilaku keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang politikus. Pengelolaan kesan yang dilakukan

jamaah persatuan islam selaku da'i juga politikus berawal dari persoalan mempresentasikan diri dan juga citra dirinya di depan orang lain yang telah memandang atau memosisikan dirinya sebagai da'i juga politikus. Strategi pengeloaan kesan yang dilakukan oleh jamaah persatuan islam untuk membangun citra diri yang baik di mata khalayaknya agar memuluskan perjuangan dakwah mereka (Koswara & Gemiharto, 2017).

PENUTUP

Persatuan Islam sebagai salah satu organisasi dakwah Islam berupaya memberikan solusi atas berbagai dinamika dan problematika keummatan. Sebagai gerakan dakwah, Persis tampil membawa visi dan misi dakwah yang didasarkan pada kebutuhan umat. Salah satu bidang garapan dakwah Persis adalah lapangan negara yang didalamnya bersinggungan dengan politik baik secara konsep maupun praktis. Pada perkembangannya, konsepsi dakwah dan politik Persis akan mempengaruhi motif diri dan pengelolaan pesan jamaah sebagai aktor sosial. Dimana bagi jamaah Persatuan Islam, baik dakwah maupun politik adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun pada faktanya, begitu besar dinamika yang terjadi dalam tubuh organisasi Persis dalam bidang politik. Hal ini berlangsung baik dalam kerangka individual (jamaah Persis) maupun dalam kerangka institusional (jamiyyah).

Motif diri menjadi da'i dan politikus bagi jamaah Persis didasarkan pada paham keagamaan dalam sudut pandang organisasi Persis yang memetakan lapangan konstitusional sebagai ruang jihad. Motif diri menjadi da'i dan politikus juga didasarkan pada spirit tajdid organisasi Persis yang melekat sejak kemunculan organisasi ini. Sementara itu, pengelolaan kesan baik sebagai da'i maupun politikus merujuk pada pandangan dan penilaian bahwa politik adalah jalan dakwah, dan dakwah adalah spirit politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R. (2016). Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam Dalam Hukum Islam, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1), 215-236.
- Abdurrahman, M. (2005). Kontroversi Golput Di Kalangan Ulama Persatuan Islam (Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2004), *Mimbar*, 221(2), 142-164.
- Amin, L. (2018). Pemikiran Abdul Latief Muchtar Dan Perubahan Sikap Politik Persatuan Islam Tahun 1983-1997, *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 1(2), 35-58.
- Anshari, I. (1975). *Aqidah Jamaah dan Imamah*. Jakarta: Publicita
- Berger, P. L., & Luckman, T. (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* (Risalah tentang SosiologiPengetahuan). Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.

- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1993). *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Farhan. (2014). Bahasa Dakwah Struktural Dan Kultural Da'i Dalam Perspektif Dramaturgi, *At-Turas*, 1(2), 269-288.
- Fatimah, N. (2018). Gerakan Puritanisme Persatuan Islam di Kepulauan Sapeken-Sumenep Madura, 1972-2016, *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1).
- Fatoni, U., & Rais, A, N. (2018). Pengelolaan Kesan Da'i dalam Kegiatan Dakwah
- Federspiel, H, M. (1970). *Persatuan Islam, Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. Ithaca, New York: Cornel University
- Goffman, E. (1959). *Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday Anchor.
- Irawan, D. (2018). Studi Etnografi Komunikasi pada Organisasi Persatuan Islam, *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-78.
- Koswara, I., & Gemiharto, I. (2017). Dramaturgis Komunikasi Politik Persatuan Islam (PERSIS), *Prosiding Magister Ilmu Komunikasi UNPAD*.
- Mulyana, D. 2001. *Nuansa-nuansa Konucnikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Cetakan Kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, D. (2000). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Cetakan Kedua. Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemuda Hijrah, *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 12(2), 211-222.
- Risdiana, A. (2019). Strategi Dakwah Persatuan Islam (Persis) Riau, *Idarotuna*, 1(2), 16-32.
- Sulaeman., Sulatri, I., & Nurdin, A. (2018). Dramaturgi Komunikasi Dakwah Para Da'i di Kota Ambon: Pola Pengelolaan Kesan di Panggung Depan, *Jurnal Komunikasi Islam*, 8(1), 87-110.
- Wildan, D. (1997). *Yang Da'I Yang Politikus, Hayat dan Perjuangan Persis*. Bandung Rosda: Karya
- Wildan, D. (2000). *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia Potren Perjalanan Sejarah Persis*. Bandung: PP Pemuda Persis.
- Zakaria, A. (1993). *Islam Hitam Putih*. Bandung: Pustaka Pesantren.